



Research Article

## Peranan Demokratisasi Kelas Menengah Sebagai Diskusi Politik

**Mulyati Kartini**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra; [moelyatikartini@gmail.com](mailto:moelyatikartini@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 12, 2024  
Accepted : August 15, 2024

Revised : July 24, 2024  
Available online : September 02, 2024

**How to Cite:** Mulyati Kartini. (2024). The Role of Middle Class Democratization as a Political Discussion. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 17-29. <https://doi.org/10.61166/service.v1i1.3>

### The Role of Middle Class Democratization as a Political Discussion

**Abstract.** The existence of an independent middle class is a prerequisite for democracy. In developing countries, including Indonesia, its existence is too strong. Such conditions can be an obstacle to national development towards democratization. The middle class in Indonesia is not a pure middle class as is understood by the middle class in the West, but a traditional society with traditional culture too (paternalistic and always upward orientation, the ties of primordialism are still strong). Therefore, it is very unlikely that the group in question will be able to act as a pure middle class fighting for the interests of the people at large, fighting for the establishment of democracy, who dare to express opinions, have a bargaining position (bargaining position) towards the government, and who are independent.

**Keywords:** middle class, democratization, and democracy.

**Abstrak.** Keberadaan kelas menengah yang independen merupakan prasyarat demokrasi. Dalam negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, hal tersebut keberadaannya terlalu kuat. Kondisi demikian dapat menjadi penghambat perkembangan nasional ke arah demokratisasi. Kelas menengah yang ada di Indonesia bukanlah kelas menengah murni seperti pengertian kelas menengah di Barat, tetapi masyarakat tradisional dengan budaya tradisional pula (paternalistik dan orientasinya selalu ke atas, ikatan-ikatan primordialismenya pun masih kuat). Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinannya kelompok dimaksud mampu berlaku sebagai kelas menengah murni yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, yang memperjuangkan tegaknya demokrasi, yang berani menyampaikan pendapat, memiliki posisi tawar (bargaining position) terhadap pemerintah, dan yang independen.

**Kata Kunci:** kelas menengah, demokratisasi, dan demokrasi.

## PENDAHULUAN

Konsep demokratisasi dan kelas menengah, merupakan dua hal yang sering menjadi pusat perhatian dalam diskusi politik. Pembicaraan berjalan terus, namun belum juga ditemukan titik temu antara demokratisasi kelas menengah. Pertanyaannya masih berkisar pada : Apakah peranan kelas menengah dalam demokratisasi ? Kemudian, Apakah secara otomatis, terciptanya kelas menengah akan melahirkan tatanan politik yang demokratis? dan Apakah terciptanya kelas menengah menjadi pertanda bahwa kehidupan politik yang demokratis sudah tegak?

Kaitan konsep kelas menengah dengan proses demokratisasi masih merupakan persoalan, baik pada tataran teoritis maupun empiris. Meskipun pengertian konsep-konsep tersebut kelas menengah, demokrasi, dan demokratisasi sudah jelas, tetapi dalam tataran empiris masih terus diperdebatkan. Misalnya: (1) Apakah kelahiran kelas menengah benar-benar mendahului munculnya proses demokratisasi? (2) Apakah di Indonesia sudah lahir kelas menengah? (3) Apa yang disebut kelas menengah?, dan seterusnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan dengan menggunakan studi literatur. Analisis data dengan teknik analisis secara kualitatif.

## LANDASAN TEORI

Perdebatan kelas menengah, ada yang mengatakan kelas menengah sudah lahir di Indonesia walau jumlahnya belum seberapa. Tetapi, ada pula yang berpendapat, kelas menengah yang ada di Indonesia bukanlah kelas menengah murni seperti pengertian kelas menengah di Barat. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kelas menengah di sini adalah kelas menengah dalam artian politik. yang disebut kelas menengah adalah mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berorientasi pada orang banyak, memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dan berstatus independen dari pengaruh pemerintah. Dengan kata lain, kelas menengah tidak boleh berkolaborasi dengan penguasa,

tidak antidemokrasi tetapi memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, serta menunjung tinggi kemanusiaan dan moralitas. Dan yang paling penting adalah tidak berkhianat terhadap, rakyat banyak. Munculnya Kelas Menengah menurut analisa modern pada dasarnya bersumber dari dua tradisi pemikiran, yakni Karl Marx dan Max Weber. Marx dan Weber tertarik dengan gejala tumbuhnya struktur kelas yang baru, dengan lahirnya masyarakat kapitalis industri.

Dalam pemikiran Weber, pembagian masyarakat menurut kelas adalah normal atau alamiah. Menurutnya, setiap individu memiliki kesempatan hidup yang berbeda dan ditentukan oleh kemampuan pasar untuk menghargai kerja seseorang dengan balas jasa kepada pemiliknya. Tapi pasar juga menghargai pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat, lebih-lebih jika langka persediaannya. Karena itu maka distribusi balas jasa selalu tidak simetris.

Marx melihat dari sisi yang lain. Konsep kelas hanyalah alat analisa untuk melihat mekanisme penghisapan dari suatu golongan atas golongan yang lain. Sumber utama dari penghisapan adalah sistem pemilikan alat-alat produksi. Hubungan antara orang-orang dengan alat-alat produksi, keduanya membentuk apa yang disebut 'kekuatan produksi', dicerminkan dalam apa yang disebut 'hubungan produksi' terdiri dari bentuk-bentuk pemilikan atas alat-alat produksi, posisi-posisi kelas dan kelompok dalam masyarakat serta hubungan antara kelas-kelas itu dan bentuk-bentuk distribusi kekayaan material. Analisa tentang modal produksi suatu masyarakat, yang dalam sistem Marxis disebut 'struktur dasar' suatu masyarakat, akan memperlihatkan gambaran mekanisme penghisapan itu.

Karena melihat susunan masyarakat dari sudut yang menindas dan ditindas, maka kelas-kelas dalam masyarakat juga pada dasarnya hanya terdiri dari dua kelas saja. Dalam masyarakat perbudakan, terdapat kelas penguasa dan budak. Dalam masyarakat feodal ditemukan kelas tuan tanah dan petani penggarap. Dan dalam masyarakat kapitalis industrial muncul kelas buruh dan kelas majikan atau pemilik modal. Namun dalam kenyataannya ada golongan-golongan yang sulit dimasukkan dalam salah satu kelas tersebut, misalnya, petani pemilik tanah luas atau sempit.

Menurut Marx, petani dan pengusaha atau pedagang kecil adalah sisa-sisa kelompok masa ekonomi pra kapitalis. merekalah yang disebut sebagai 'golongan tengah' yang pada dasarnya adalah kelompok-kelompok masa peralihan, yang berkecenderungan konservatif. Posisinya terletak di antara kelas pekerja dengan kelas kapitalis dan tuan tanah. Adanya transisional itu dikatakannya sebagai pengaburan batas antara kaum buruh dan borjuis. Berbeda dengan Marx, Weber membagi masyarakat kapitalis secara ekonomi menjadi lima kelas, yaitu : (1) Kelas di pemilik lapisan teratas yang identik dengan kelas borjuasi dalam pemikiran Marx. (2) Kelas pekerja di tingkat terbawah yang identik dengan kelas buruh. (3) Kelas-kelas intelegensia. (4) Manajer dan administrator. (5) Borjuis kecil.

Dalam arti tradisional yang terdiri dari golongan pengusaha, pedagang dan petani. Golongan terakhir tersebut identik dengan strata peralihan Marx. Identifikasi Weber mengenai kelas intelegensia dan manajer serta administrator, memberi ilham kepada aliran Marxis dan Non Marxis untuk mengembangkan teori mengenai 'golongan menengah baru'. Golongan menengah lama menurut aliran

Marxis terdiri dari: (1) Produsen kecil, (2) Pengrajin, (3) Kaum profesional yang independen, (4) Petani kecil. Sedangkan golongan tengah baru muncul sebagai: (1) Pegawai kecil, (2) Pengawas Pabrik, (3) Pegawai teknis, (4) Guru, (5) Pegawai pemerintah dan semacamnya yang timbul kemudian pada masyarakat kapitalis.

Menurut teori Marxis, dari kalangan buruh yang memegang posisi pimpinan dalam pabrik-pabrik berkembang menjadi aristokratisasi buruh yang menjadi konservatif. Dari sinilah terbentuk basis lahirnya fasis, walaupun mereka juga melihat adanya proses radikalisisasi golongan tengah baru itu. dengan mengacu pada Weber, teori non-Marxis melakukan analisis kelas dalam memperluas kriteria, dari kriteria ekonomi kepada kriteria lain, misalnya politis dan sosiologis. Dalam perkembangan sosiologi timbul upaya untuk membedakan golongan-golongan masyarakat secara hierarkis, dengan tekanan melihat ketidaksamaan atau kepincangan sosial karena perbedaan: (1) Tingkat pendapatan, (2) Pembagian kekayaan, (3) Jenjang kekuasaan, (4) Prestise, (5) Umur, (6) Etnisitas

Dengan cara ini tidak lagi dilakukan analisis kelas, melainkan stratifikasi yang menghasilkan strata-strata dalam masyarakat. Pembagian para sosiolog menggunakan konsep status untuk melihat posisi seseorang dalam sistem sosial dimana ia hidup, dengan melihat kepada faktor 'kesempatan hidup' dan gaya hidup. Selain stratifikasi, sosiolog juga melakukan strukturisasi, yaitu membedakan kelompok-kelompok masyarakat dengan kriteria ekonomi dan kemudian ditranformasikan menjadi kelompok-kelompok sosial.

Perkembangan konsep-konsep baru di bidang sosiologi tersebut sebenarnya mencerminkan perkembangan nyata dalam masyarakat. Perkembangan ini sudah terlihat oleh Marx, yaitu bertambah banyaknya jumlah 'kelas menengah', dan keaneka ragamannya, dengan tumbuhnya profesi baru yang membentuk kelas baru. Signifikansi golongan menengah lebih menonjol karena jumlahnya, tetapi juga karena sifatnya yang lebih menunjukkan kualitasnya. Golongan menengah tidak saja merupakan tulang punggung masyarakat ekonomi, melainkan juga motor penggerak masyarakat melalui peranan politiknya. Tumbuhnya golongan menengah tersebut mendukung proses demokratisasi. Apabila golongan menengah kuat, maka mekanisme demokrasi dapat diharapkan berjalan lancar. Kedudukan golongan menengah yang makin kuat, memberi argumentasi baru bagi legitimasi masyarakat kapitalis dan sistem ekonomi bebas.

Dengan menonjolnya kedudukan dan peran sentral golongan menengah, maka arti penting borjuasi sebagai kelas 'pemerias' dalam konsep Marxis menjadi berkurang. Menurut Marx, negara adalah 'komite penyelenggara' bagi kepentingan borjuasi, yang setelah memperoleh kekuasaan dengan berebut, kemudian menguasai kekuatan politik. Namun dalam kenyataan umumnya mereka yang duduk dalam birokrasi atau pimpinan negara pada umumnya bukan kalangan borjuis, seperti halnya di Amerika Serikat, dimana seorang presiden atau menteri adalah bekas manajer atau pemilik perusahaan besar. Setelah menjabat ia diminta kembali menjadi pimpinan perusahaan besar, ini adalah suatu kelas tersendiri yang dilahirkan oleh birokrasi. Karena itu, mereka bisa dan malah dalam berbagai kasus bertindak kurang independen dalam arti mewakili negara dan birokrasi memiliki kepentingan sendiri.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Perkembangan Kelas Menengah

Perkembangan masyarakat Eropa memberikan gambaran yang lain bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (meskipun di antara kita ada kecenderungan menyamakan atau "menyontek" yang terjadi di Barat). Transformasi ekonomi dan politik di negara-negara Eropa dapat dikatakan dirintis oleh kaum kapitalis independen.

Sebelum Revolusi Perancis (1789) piramida masyarakat Eropa terbagi menjadi tiga kelompok. Pada puncak piramida duduklah raja, lapisan tengah adalah kelompok borjuis (kaum bangsawan, tuan tanah), dan lapisan bawah adalah masyarakat (rakyat jelata, kaum pedagang, anggota masyarakat terdidik). Masa-masa sebelum pecah revolusi, posisi tersebut tidak tergoyahkan sama sekali. Baik strata pertama maupun kedua diperoleh secara turun-temurun, demikian pula strata ketiga.

Tetapi, ketika dan setelah revolusi, semuanya berubah. Diantaranya Perancis menjadi republik. Kemudian strata kedua pun tertembus strata ketiga. Banyak anggota masyarakat yang terdidik dan kaum pedagang (yang maju secara ekonomi) "naik tingkat" ke strata kedua. Mereka lahir sebagai kelas menengah baru yang mandiri dan ikut serta dalam menentukan perjalanan negara. Apa yang terjadi di Perancis itu kemudian menular ke banyak negara Eropa.

Sebaliknya, yang terjadi di Indonesia sangat berbeda. Indonesia tidak mengenal kelompok masyarakat pedagang (terutama setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan pesisiran). Dalam perjalanannya, sejarah pasca penjajahan pun tidak memperlihatkan lahirnya kelas menengah (yang terdiri dari kelompok pedagang dan masyarakat terdidik). Karena memang, selama masa penjajahan Belanda hal itu sangat dihindari. Kalaupun ada kelompok masyarakat pedagang, mereka berasal dari masyarakat Cina yang bertindak sebagai "perantara". Kalaupun sekarang dikatakan ada kelas menengah, mereka dapat dikatakan bukan kelas menengah murni. Mereka bahkan dapat dikatakan masyarakat tradisional dengan budaya tradisional pula (paternalistik dan orientasinya selalu ke atas, ikatan-ikatan primordialismenya pun masih kuat).

Kelas menengah yang sekarang disebut-sebut sudah terbentuk adalah kelas menengah semu. Sebab, mereka menjadi kelas menengah lebih disebabkan ketidakmandirian mereka atau sangat bergantung pada pemerintah. Mereka muncul sebagai kelompok yang menikmati fasilitas yang dibagi-bagikan pemerintah dan sebagai balasannya mereka loyal. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinannya bahwa mereka mampu berlaku sebagai kelompok kelas menengah murni yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, yang memperjuangkan tegaknya demokrasi, yang berani menyampaikan pendapat, memiliki posisi tawar (bargaining position) terhadap pemerintah, dan juga yang independen.

Dalam bahasa sosiologis mereka itu sudah terbawa arus mobilisasi sponsor. Mereka naik karena sponsor, bukan naik secara sewajarnya karena tuntutan zaman yang sudah berubah. Sedang dalam bahasa politik, mereka adalah kelompok yang sudah terkooptasi. Jumlah mereka pun belum merupakan mayoritas. Sedangkan biasanya tanda dari kelas menengah adalah mereka merupakan mayoritas bangsa

atau hampir menjadi mayoritas. Kalau kurang dari itu (kurang dari mayoritas) katakanlah 40 persen atau kurang dari 30 persen jumlah penduduk, mereka bukan kelas menengah melainkan kelompok elite. Barangkali inilah salah kaprahnya, kelompok elite disebut kelas menengah.

Padahal, stratifikasi internal elite itu hanya beberapa gelintir orang dan selebihnya terlempar. Mereka (yang disebut-sebut, sebagai kelas menengah itu) tidak secara otomatis menjadi kelas menengah, namun mereka hanya menjadi kontra elite. Dari pemahaman seperti di atas jelaslah bahwa yang sekarang ada adalah kelas elite dan rakyat. Padahal semestinya kelas menengah yang muncul itu adalah kelas menengah yang merupakan hasil dari proses ekonomi yang menetap dan untuk jangka waktu tertentu. Dan bukan mereka yang muncul secara instan.

### **Demokratisasi dan Demokrasi**

Keberadaan kelas menengah yang independen adalah prasyarat demokrasi, tanpa adanya lapisan kelas menengah ini demokrasi tidak bisa bekerja. Disini terkandung pengertian, bahwa negara terutama negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia terlalu kuat sehingga mesin kekuasaan menjadi penghambat perkembangan nasional ke arah demokratisasi. Namun negara bisa memainkan peranan penting dalam membina golongan menengah, yakni melalui pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan tersebut secara universal negara memerlukan peranan transisi. Dalam peranan transisi negara harus kuat agar mampu mengambil keputusan tegas untuk menciptakan stabilitas politik. Dengan demokrasi, pemerintah selalu mengalami kegoncangan karena persaingan di antara kelompok-kelompok yang ingin berkuasa.

Dewasa ini, komposisi kelas menengah telah lebih luas dari kelas borjuasi karena perkembangan ekonomi yang berhasil menciptakan golongan-golongan baru berpendapatan menengah ke atas. Dalam konsep kelas menengah terdapat kaum borjuasi dan non-borjuasi yang jumlahnya lebih besar dari kaum pengusaha. Golongan menengah inilah yang menjadi basis sosial dari demokrasi. Demokrasi yang diinginkan orang dewasa ini adalah 'demokrasi kelas menengah'. Itulah sebabnya maka orang mengatakan bahwa adanya kelas menengah adalah prasyarat bagi demokrasi. Sebenarnya istilah ini masih merupakan contradiction in terminis. Yang sebenarnya memerintah tetaplah kelompok elit. Namun ada beberapa penjelasan yang perlu dikemukakan.

Kita mengenal demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Demokrasi langsung hanya ada dalam masyarakat Yunani kuno atau suatu ketika dalam masyarakat Swiss. Tapi demokrasi langsung pada dasarnya hanya ada dalam teori. Dalam kenyataannya, demokrasi ini diwujudkan dalam sistem perwakilan. Jadi rakyat memilih wakil-wakilnya dalam DPR dan pemerintahan.

Walaupun yang memerintah kelompok elit, tetapi elit bisa berganti. Rakyat berhak mengajukan calon-calon pemimpin dan wakil-wakil mereka dalam parlemen. Disamping ada hak memilih, rakyat juga berhak mencalonkan diri atau dicalonkan untuk dipilih melalui suatu forum pemilihan umum. Sehingga ada peluang untuk mengganti elit yang memerintah (sirkulasi elit).

Walaupun hanya sekelompok kecil orang yang diberi wewenang dan legitimasi untuk memerintah, rakyat tetap wajib tunduk kepada pemerintah itu berdasarkan Undang-undang, peraturan atau kebiasaan umum yang tidak tertulis. Rakyat mempunyai hak untuk mengatur, meminta pertanggungjawaban, bahkan memprotes dan mengontrol. Lagi pula ada hak-hak tertentu yang pemerintah juga harus menjaga, melindungi dan memenuhinya, yang sering disebut hak-hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut pada umumnya tercantum sebagai nilai dasar dari berbagai peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya demokrasi tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia. Karena HAM menjamin hak-hak rakyat sebagai konsekuensi diberikannya wewenang kepada pemegang kekuasaan dalam negara.

Namun seringkali rakyat tidak tahu dan tidak menyadari hak-haknya. Ketika kaum elit membentuk negara, mereka hanya mengatasnamakan rakyat, sedangkan rakyat sendiri tidak terlibat banyak. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah dan tidak merata. Dampaknya adalah sebagian rakyat saja yang mengetahui, menggunakan, dan mempertahankan hak-haknya ketika dirampas, dilanggar atau tidak terpenuhi.

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dalam masyarakat yang berpendidikan. Dalam masyarakat yang kurang berpendidikan, maka mesin demokrasi cenderung tidak jalan karena rakyat tidak mengetahui adanya hak-hak asasi manusia. Lalu bagaimana kini dengan demokratisasi dan demokrasi? Kalau kini dikatakan bahwa Indonesia sudah berada di depan pintu gerbang demokrasi, rasanya (berdasarkan uraian tersebut di atas) kurang tepat. Barangkali yang lebih tepat adalah bahwa kita tengah berjalan menuju jalan demokrasi. Mengapa? Kalau ada kesepakatan bahwa keberadaan kelas menengah merupakan prasyarat terciptanya demokrasi, demokrasi itu masih jauh terbentuk sebab yang disebut kelas menengah itu sendiri belum ada. Padahal, lahirnya atau adanya kelas menengah juga belum menjadi penjamin bahwa demokrasi akan tercipta juga. Katakanlah, tahapan lain yang harus dilalui yakni terciptanya apa yang disebut civil society dan civic competence.

Pengertian demokrasi sendiri yang selama ini disepakati adalah setidaknya mengandung dua dimensi yakni dimensi hak-hak asasi rakyat dan dimensi sistem pemerintahan. Bagaimana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh negara dan sistem pemerintahan yang berlaku. Dalam politik yang perlu dipertimbangkan tidak hanya sistem politik yang ideal, tetapi juga situasi aktual yang dialami masyarakat. Sistem politik ideal hanya akan terwujud dalam dunia nyata, apabila didukung antara lain oleh komposisi sosio-ekonomi masyarakat yang sesuai. Sedangkan komposisi sosio-ekonomi tertentu akan melahirkan pola sikap dan perilaku (budaya) tertentu.

Yang menjadi soal sekarang adalah munculnya anggapan atau keyakinan bahwa seolah-olah demokratisasi merupakan proses yang tidak melibatkan upaya sadar manusia, khususnya dari pemerintah dan para pembuat undang-undang untuk mengarahkan perkembangan masyarakat. Keyakinan lain yang kadang muncul adalah demokrasi merupakan proses alamiah. Keyakinan seperti yang melahirkan keyakinan baru bahwa demokrasi tidak berkembang karena masyarakat

tidak berkembang. Padahal bisa juga terjadi demokrasi tidak berkembang karena upaya sekelompok kecil elite yang berusaha mempertahankan status quo. Karena itu, kerap kali terjadi pernyataan yang mengandung kebenaran dan wisdom pada suatu tingkat dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan demokratisasi secara terencana.

Dari kondisi seperti itu kita berharap lahirnya sebuah terobosan besar yang mampu merobek kebuntuan. Barangkali terobosan itu akan terjadi setelah munculnya berbagai "pusat-pusat kekuasaan" yang satu sama lain bisa dan memiliki posisi tawar. Kelahiran ICMI, PCPP, PSCMI, dan yang masih gres YKPK yang merupakan "pusat-pusat kekuasaan" baru, tentu diharapkan menjadi semacam titian yang membawa ke arah demokratisasi dan demokrasi. Mereka juga diharapkan bergerak untuk sebuah usaha etatisme atau politisasi satu arah, sehingga pada akhirnya lahir yang selama ini dicita-citakan: sebuah negara demokrasi.

Susunan masyarakat demokratis terdiri dari orang-orang yang menjadi rekan setara untuk berdiskusi. Suatu hubungan yang tidak bersifat dominatif dan hanya kelas menengah yang memiliki komposisi ini. Kelas menengah tidak hanya tahu mematuhi kewenangan dan hukum, tetapi juga mampu memerintah bagi kepentingan bersama, berdasarkan prinsip persamaan dan penghormatan atas individu setiap warga negara.

### **Kelas Menengah Dan Demokratisasi**

Kelas menengah kita cenderung konservatif, pasif, dan penuh ambivalensi terhadap pilihan pemihakan yang mendasar dalam berbagai konflik sosial. Sikap konservatif dan pasif mereka, terlihat pada prioritas yang mereka anggap terpenting, yaitu penanggulangan kriminalitas dan pertumbuhan ekonomi, bukannya perubahan politik dan pengembangan ide-ide kritis dalam masyarakat. Selain itu mereka sangat tak terlibat dalam berbagai organisasi sosial yang bersifat civic, yang oleh Alexis de Tocqueville dianggap sebagai "infrastruktur" masyarakat demokratis.

Kelas menengah Indonesia memang dianggap tak mampu menjadi motor perubahan, sebab posisi anggota kelas ini terlalu bergantung pada negara. Dalam posisi ketergantungan demikian, mereka tak memiliki banyak pilihan selain bersikap apatis dan mencari kompensasi pada hal-hal yang lebih bersifat konsumtif dan "material". Buat mereka, risiko untuk bersikap kritis terlalu besar. Semua ini dengan kata lain berujung pada kesimpulan bahwa proses transformasi politik di negeri kita memang harus menunggu lebih lama lagi. Kita belum memiliki kekuatan penggerak demokrasi yang dapat diandalkan.

Pesimisme demikian walau cukup beralasan, tak sepenuhnya benar. Pandangan seperti ini melihat pertumbuhan peran kelas menengah secara statis, bukan dinamis. Kita harus ingat bahwa pada 1980-an, pesimisme yang sama juga sering dilontarkan terhadap peran kelas menengah di Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Tapi apa yang terjadi pada awal 1990-an sama sekali meruntuhkan pesimisme ini: kekuatan kelas menengah, seperti kaum profesional dan mahasiswa, mendorong terjadinya proses transisi, dari rezim otoritarian ke arah rezim yang lebih demokratis.



Ini berarti kelas menengah, yang pada dasarnya konservatif dan pasif itu, dalam waktu dan konteks tertentu bisa saja berubah sikap dan menjadi radikal (radikalisme temporer). Dan, sebagaimana bisa dipelajari dari kasus di tiga negara tadi, perubahan sikap seperti ini bisa terjadi dalam periode yang cukup singkat. Kalau kita lihat dari kasus demokratisasi yang banyak terjadi belakangan ini, faktor-faktor yang menjadi prakondisi demikian setidaknya ada dua, yaitu :

- munculnya tindakan dan perilaku dari penguasa "rezim lama" yang oleh opini publik dianggap telah melampaui batas toleransi moral. Faktor ini bisa disebut sebagai the triggering factor. Dalam kasus di Thailand, misalnya, hal ini dapat dilihat dalam kudeta yang dilakukan Jenderal Suchinda, dan penembakan beberapa aktivis mahasiswa yang melakukan protes terhadap kudeta tersebut. Faktor seperti ini bisa juga berwujud dalam tindakan korupsi, kolusi, dan refeodalisasi yang meluas (anak dan keluarga penguasa politik menjadi pengusaha mahakuasa), dan banyak lagi.
- munculnya kepemimpinan alternatif yang datang dari luar, tapi lebih sering dari dalam rezim itu sendiri. Yang terakhir ini sering disebut sebagai elite reformis. Di Korea Selatan, elite reformis ini bisa dilihat pada sosok Roh Tae Woo, tokoh yang berani mengambil risiko melepaskan sebagian kekuasaannya dengan melakukan kompromi terhadap tuntutan-tuntutan kaum oposisi dan aktivis mahasiswa. Dalam konteks lain, elite seperti ini bisa dilihat pada diri Gorbachev dan Yeltsin. Mereka adalah pentolan-pentolan partai penguasa di Uni Soviet, yang bisa menangkap 'isyarat sejarah" dan kemudian menjadi reformis.

Faktor pertama tadi memberi landasan moral bagi demokratisasi, sedangkan faktor kedua memberinya faktor-faktor pendorong, heroes of change, yang secara tiba-tiba mampu menggerakkan publik untuk bersatu dalam tindakan-tindakan yang melahirkan rezim demokratis.

### **Prospek dan Investasi Demokrasi Indonesia di Masa Depan.**

Situasi sekarang ini agak mengecilkan hati, misalnya banyak tokoh-tokoh pro demokrasi berada di penjara, kemudian organisasi-organisasi yang memperjuangkan demokrasi selalu mengalami guncangan-guncangan. Begitupun pembatasan gerak langkah maupun pergantian tokoh-tokoh masyarakat dari organisasi resmi telah berjalan mulus, malah bisa dikatakan sukses. LSM dan gerakan-gerakan mahasiswa pun tiarap. Tapi, ada juga hal-hal yang menyenangkan seperti adanya perlawanan rakyat. Sekarang rakyat tidak lagi diam kalau ditindas, dan pasti berkata "tidak".

Hegel mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suatu gerak sejarah umat manusia. Hegel mengatakan secara simplistik bahwa sejarah ini merupakan pertarungan dua kekuatan, spiritual dan duniawi. Hegel adalah filosof Jerman, ia sebetulnya diharapkan oleh orang tuanya menjadi pendeta. Tetapi ia lebih tertarik pada filsafat dan memang ia pernah sekolah teologis. Dalam filsafatnya, pengaruh agama sangat kuat, yaitu adanya kekuatan mesianis yang disebut kekuatan spiritual menghadapi kekuatan duniawi. Kekuatan duniawi sifatnya sementara sedangkan

kekuatan spiritual sebaliknya. Jadi sejarah merupakan pergulatan antara kepentingan pribadi menghadapi kepentingan yang lebih besar.

Sejarah mengungkap terus, makin lama kekuatan spiritual ini akan terus memanifestasikan dirinya. Salah satu cirinya, sejarah adalah cerita tentang pembebasan manusia. Manusia makin lama makin bebas, tidak mungkin tidak. Dan Hegel mengatakan, bebas hakikatnya individu yang tadinya tidak merdeka menjadi sangat merdeka. Sehingga dengan demikian gerak sejarah dalam sistem politik adalah bergerak dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang demokratis.

Dulu, kekuatan masyarakat dikuasai oleh satu orang yaitu kekuatan monarki. Sesudah itu kekuatan monarki ini berubah menjadi kekuatan oligarki. Dan pada akhirnya kekuatan oligarki ini harus berubah lagi menjadi kekuatan demokrasi. Tentu dalam arti yang sangat teoritis dan menunjuk dalam laboratorium sejarahnya, sejarah manusia ini terus bergerak. Dari otoritarianisme menjadi demokratis, di semua negara proses itu ada yang lambat dan cepat tapi pasti terjadi. Hegel tentunya tidak punya data-data empirik, tetapi filsafat ini sangat kuat dalam realitasnya.

Ini yang diambil oleh ilmuwan Jepang F. Fukuyama dalam bukunya *The End History*. Menurutnya, ramalan itu terjadi ketika krisis di negara-negara sosialis, di mana negara otoriter menjadi sosialis dan sekarang semua di dunia dianggap sudah demokratis. Maka inilah yang diistilahkan oleh Hegel bahwa kita sudah masuk ujung sejarah. Tentu saja ini sangat menarik. Pemikiran ini kemudian diikuti secara kuat oleh Fukuyama.

Kalau kita lihat dari data-data empiris teori Hegel ini juga dinyatakan oleh Samuel Huntington yang menulis bukunya "Gelombang Ketiga". Menurutnya, dalam sejarah manusia modern ada tiga gelombang demokratisasi. Gelombang pertama (1828-1926) yaitu ketika terjadi kebangkitan dari Revolusi Prancis (diikuti Revolusi Amerika dan sebagainya) dengan agenda menumbangkan feodalisme. Dari suatu kekuatan yang feodal yang otoriter muncul gerakan rakyat yang terus berkembang yang membuat rontoknya kekuatan raja dan bangsawan-bangsawan lain. Maka tahun 1828 merupakan gelombang pertama demokratisasi yang ditandai secara keras dalam melawan feodalisme. Kemudian, menurut Huntington, setelah itu terjadi set back: kondisi yang demokratis berubah menjadi otoriter lagi. Tapi ini hanya sebagian kecil, kemudian maju lagi. Menurut istilah Huntington, gerak demokrasi itu maju dua langkah dan mundur satu langkah. Dalam kata lain, pada gelombang pertama ada proses demokratisasi, namun ada juga set back. Beberapa negara yang sudah demokratis diantaranya rontok lagi.

Gelombang kedua terjadi tahun 1943-1962 yaitu setelah perang dunia kedua. Masa ini terjadi proses depolitisasi besar-besaran, misalnya negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tapi setelah tahun 1960-an terjadi set back lagi, beberapa negara yang demokratis menjadi otoritarianisme lagi. Kita pun ternyata mengalami hal yang sama. Di Indonesia tahun 1949 terjadi proses demokratisasi, kemudian set back lagi ketika Bung Karno, berkuasa. Tapi juga ada beberapa negara yang memang maju lagi.

Gelombang ketiga terjadi pada era tahun 1974 - sekarang. Tahun 1974 ditandai dengan munculnya demokratisasi yang dipimpin oleh militer dengan

ditumbangkannya rezim Portugal. Ini juga ditandai dengan krisis di negara-negara Sosialis. Dalam *The Jakarta Post*, ada artikel yang ditulis Jonathan Powel yang menyatakan bahwa pada tahun 1996 terdapat 79 negara yang menjadi demokratis dari 161 negara yang ada. Dan ada 135 juta orang yang hidup di bawah negara yang demokratis. Ramalan Hegel yang sifatnya filosofis membuktikan bahwa proses demokratisasi tidak terelakkan dan akan berjalan terus. Meskipun tidak secepat yang diinginkan, namun pasti terjadi.

### **Kasus di Indonesia**

Lantas bagaimana di Indonesia? Apakah juga terjadi proses demokratisasi? Kalau melihat tahun 1996 lalu memang cukup mengecilkan hati. Kerusuhan, penangkapan tokoh-tokoh demokrasi, dan pemberangusan pers dan sebagainya. Di tengah kekecilan hati, dalam proses jangka panjang memberikan harapan. Apa yang terjadi saat itu, bukan hanya negative point saja tetapi sisi positifnya juga banyak. Untuk memberikan dasar dari pernyataan ini, terlihat dari kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

Pertama adalah kejadian dramatis tatkala Megawati Soekarnoputri dipilih sebagai ketua PDI ada skenario yang keras dari pemerintah untuk menjegalnya. Dan kemudian muncul arus bawah yang kuat sekali mendukung Megawati. Sehingga pemerintah berpikir dua kali untuk memaksakan skenarionya tersebut dan yang terjadi adalah kompromi. Akhirnya Megawati diterima dan dikompromikan, dan ternyata hal ini separuh langkah ke arah demokrasi. Ini dibuktikan di tahun 1996, langkah yang dikompromikan itu menjadi aset bagi perjuangan demokrasi.

Peristiwa kedua adalah dibredelnya tiga media massa: Tempo, Editor dan Detik. Pembredelan bukan yang pertama kali. Tapi melalui pembredelan ini, muncul lembaga-lembaga alternatif pers semisal AJI yang menandingi PWI, ISAI sebagai lembaga media alternatif dan Tempo Interaktif sebagai media elektronik di internet. Internet juga merupakan proses teknologi dalam mengkampanyekan proses demokrasi. Ini sulit dikontrol oleh pemerintah, meski saat itu ABRI mencoba mengkonternya dengan membentuk ABRI-net.

Dari sini bisa disimpulkan, apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 1996 tersebut terjadi investasi yang besar-besaran dalam demokrasi. Memang keuntungan belum bisa diambil saat itu juga, tapi di masa depan bisa menciptakan produksi yang kuat. Karena bukan hanya kelas bawah yang bereaksi dan melawan, tetapi juga kelas menengah profesional. Ini proses yang terjadi di dalam negeri.

Di samping itu, proses dalam negeri ini mendapat dukungan kuat dari proses yang terjadi di dunia, yaitu proses internasional. Pertama, Indonesia, ketika pemerintah Orde Baru dicetuskan, banyak negara-negara Barat mendukung. Mereka menganggap militer Indonesia adalah militer yang "lain", citranya baik. Ini terjadi tahun 1960-an. Tetapi dengan munculnya kasus di Timor Timur, terutama terjadi penembakan di Santa Cruz, maka citra militer Indonesia di Barat tidak berbeda dengan yang lain, yaitu bisa menembak demonstrasi-demonstrasi yang damai. Ini merubah citra Indonesia di mata Barat. Kasus Timor-Timur ini merupakan suatu proses yang membuat Indonesia ditekan untuk melakukan proses

demokratisasi. Apalagi dengan dianugerahkannya Nobel kepada Belo dan Horta, maka itu merupakan pengakuan internasional yang melegitimasi perjuangan rakyat Timor Timur. Dampaknya, Indonesia makin tersudut dalam banyak hal.

Kedua, proses yang terjadi di Indonesia adalah perubahan transplacement. Kekuatan arus bawah makin besar dan pihak militer melihat kekuatan ini sukar dibendung. Kemudian terjadi suatu perundingan antara pihak oposisi dan militer untuk satu perubahan yang damai dalam menyelamatkan pembangunan. Program yang lebih bagus dalam demokrasi adalah investasi yang lebih banyak lagi untuk membentuk kekuatan arus bawah.

## REERENSI

- Huntington, Samuel P. 1993. *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*. Oklahoma : University Press
- Rahardjo, M. Dawan. 1999. *Masyarakat Madani : Agama, Kelas menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta : LP3ES
- Afan Gafar. 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Rizal Mallarangeng. 16 Juni 2004. *Kelas Menengah Demokratisasi*. Jakarta : Kolom Gatra. Available on line at [apakabarCclark.net](http://apakabarCclark.net) (Diakses:5 Mei 2008)
- Ferdi RS. 2004. *Peron Dan Partisipasi Politik di Indonesia*. Jakarta : Kolom Gatra. Available on line at [apakabaTaxlark.net](http://apakabaTaxlark.net) (Diakses : 5 Mei 2008)
- Fadjoel Rachman. 2004. *Oposisi Sosial Dan Kelas Menengah*. Jakarta Kolom Gatra.
- Ibrahim. (2024). *KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu)*. *Jurnal Aspirasi*, 14(2), 76–85. Retrieved from <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/124>
- Juliasnyah, R. . I. ., Natsir, L. F., & Pangestu, M. A. . (2024). *PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PABEAN UDIK DALAM PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA PABEAN UDIK*. *Jurnal Aspirasi*, 14(01), 61–69. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.108>
- Kartini, M. . (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) (STUDI KASUS DI DESA KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU)*. *Jurnal Aspirasi*, 14(01), 7–18. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.116>
- Suryani, & Andayani Listyawati. (2024). *PERAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN WARGA*. *Jurnal Aspirasi*, 14(2), 88–100. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.126>